



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG NURYANTA, S.E., M.M.**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **731231**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.060.900.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m²/40 m² di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 220.600.000
2. Tanah Seluas 416 m² di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 855.100.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/90 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 855.100.000
4. Tanah Seluas 66 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 6.600.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m²/230 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 123.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 32.000.000

1. MOTOR, HONDA MANUAL Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.400.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.400.000
4. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.150.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 45.900.421



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.152.950.421

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.152.950.421

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.